

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian yang dikaji dalam penelitian adalah Pengawasan Melekat, Komitmen Organisasi, dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja. Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mengetahui gambaran pemerintah yang menjadi subjek penelitian, berikut gambaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

3.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Tasikmalaya

Dimulai pada abad VII sampai sampai abad ke XII di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Tasikmalaya, diketahui adanya suatu bentuk Pemerintahan Kebataraan dengan pusat pemerintahannya disekitar Galunggung, dengan kekuasaan mengabisheka raja-raja (dari Kerajaan Galuh) atau dengan kata lain raja baru dianggap syah bila mendapat persetujuan Batara yang bertahta di Galunggung. Batara atau sesepuh yang memerintah pada masa abad tersebut adalah sang Batara Semplakwaja, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Batara Watsuhayu, dan Batari Hyang yang pada masa pemerintahannya mengalami perubahan bentuk dari kebataraan menjadi kerajaan.

Kerajaan ini bernama Kerajaan Galunggung yang berdiri pada tanggal 13 Bhadrapada 1033 Saka atau 21 Agustus 1111 dengan penguasa pertama yaitu Batari Hyan, berdasarkan prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di bukit Geger Hanjuang, Desa Linggawangi, Kecamatan Leuwisari, Tasikmalaya. Dari Sang

Batari inilah mengemuka ajaran yang dikenal sebagai Sang Hyang Siksakandang Karesian. Ajarannya ini masih dijadikan ajaran resmi pada jaman jaman Prabu Siliwangi (1482-1521 M) yang bertahta di Pakuan Pajajaran. Kerajaan Galunggung ini bertahan sampai 6 raja berikutnya yang masih keturunan Batari Hyang.

Periode selanjutnya adalah periode pemerintahan di Sukakerta dengan ibukota di Dayeuh Tengah (sekarang termasuk kedalam kecamatan salopa, Tasikmalaya), yang merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Pengusaha pertama adalah Sri Gading Anteg yang masa hidupnya sejaman dengan Prabu Siliwangi. Dalam Sukakerta sebagai peneus tahta diperkirakan sejaman dengan Prabu Surawisesa (1521-1535 M) Raja Pajajaran yang menggantikan Prabu Siliwangi.

Pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa kedudukan Pajajaran sudah mulai terdesak oleh gerakan kerajaan Islam yang dipelopori oleh Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati sejak tahun 1528 berkeliling keseluruhan wilayah tanah Sunda untuk mengajarkan agama Islam. Ketika Pajajaran mulai lemah, daerah-daerah kekuasaan yang terutama terletak dibagian timur berusaha melepaskan diri. Mungkin sekali Dalam Sukakerta atau Dalam Sentawoan sudah menjadi penguasa Sukakerta yang merdeka, lepas dari Pajajaran. Tidak mustahil pula kedua penguasa itu sudah masuk Islam.

Periode selanjutnya adalah Pemerintahan di Sukapura yang didahului oleh masa pergolakan di wilayah Priangan yang berlangsung lebih kurang 10

tahun. Munculnya pergolakan ini sebagai akibat persaingan tiga kekuatan besar di Pulau Jawa pada awal abad XVII Masehi: Mataram, Banten, dan VOC yang berkedudukan di Batavia. Wirawangsa sebagai penguasa Sukakarta kemudian diangkat sebagai Bupati daerah Sukapura, dengan gelar Wiradadaha¹, sebagai hadiah dari Sultan Agung Mataram atas jasa-jasanya membasmi pemberontakan Dipati Ukur. Ibukota negri yang awalnya di Dayeuh Tengah, kemudian dipindahkan Leuwiloe Sukaraja dan “Negara” disebut “sukapura”.

Pada masa pemerintahan R.T Surialaga (1813-1814) ibukota Sukapura dipindahkan ke Tasikmalaya. Kemudian pada masa Pemerintahan Wiradadaha VII ibukota dipindahkan ke Manonjaya (1832). Berpindahnya ibukota ini dengan alasan untuk memperkuat benteng-benteng pertahanan Belanda dalam menghadapi Diponegoro. Pada tanggal 1 Oktober 1901 ibukota Sukapura berpindah lagi ke Tasikmalaya. Latar belakang pemindahan ini cenderung dengan alasan ekonomis bagi kepentingan Belanda. Pada waktu itu daerah Galunggung yang subur sebagai penghasil kopi dan nila. Sebelum di ekspor melalui Batavia terlebih dahulu dikumpulkan disuatu tempat, biasanya di ibukota daerah. Letak Manonjaya kurang memenuhi untuk dijadikan tempat pengumpulan hasil-hasil perkebunan yang ada di Galunggung.

Nama Kabupaten Sukapura pada tahun 1913 diganti namanya sebagai Kabupaten Tasikmalaya dengan R.A.A Wiratanuningrat (1908-1937) sebagai Bupati. Tanggal 21 Agustus 1111 Masehi dijadikan hari jadi Tasikmalaya berdasarkan Prasasti Geger Hanjuang yang dibuat sebagai tanda upacara pestabihan atau penobatan Batari Hyang sebagai penguasa di Galunggung.

Pada tahun 1913 nama Kabupaten Sukapura diganti menjadi Kabupaten Tasikmalaya hingga kini. Daerah bawahannya tinggal 10 wilayah. Atas putusan Bestuurservorming pada tahun 1925, Tasikmalaya menjadi ibukota Keresidenan Priangan Timur, tetapi pada tahun 1931 Keresidenan itu mengalami perubahan lagi. Atas jasa Kanjeng Bupati yang begitu besarnya, pemerintah tidak ragu, berdasarkan surat P.K.T. Goebornoer Djendral tanggal 21 Agustus 1920, No. 1, diberi gelar “Adipati”, ditambah lagi surat P.K.T. Besar tanggal 24 Agustus 1922, no. 39, beliau menerima bintang dalam “*Officer de Order van Oranje Nassau*” dan menurut surat Goepernoemen tanggal 21 Agustus 1926 No. 13 diberikan lagi “Gele Songsong”. Kebijakan Kanjeng Bupati didalam keunggulannya mengolah Negara setelah Kanjeng Dalem Adipati Wiratanoeningrat bupati ke XIV wafat digantikan oleh R. Tumenggung Wiradipoetra (1938-1944) paman misan dari bapak, putra Dalem Bintang. Pengangkatan Bupati berdasarkan surat dari pemerintah No. 16. Diberi gelar Adipati, beristri R. Bentang Radja saudari misan dari bapak, yaitu putra Dalem Bogor.

Berdasarkan permintaan Kanjeng Dalem Adipati Wiradipoetra untuk berhenti dan pension, kemudian digantikan oleh adiknya yang bernama R. Tumenggung Aria Soenarya (sebelumnya Bupati Ciamis) 1944-1947, putra dari bupati ke XII, R. Tumenggung Wirahadiningrat. Kepindahan R. Tumenggung Aria Soenarya ke Bandung, maka jabatan bupati digantikan lagi oleh R. Tumenggung Wiradipoetra (adalah bupati Sukapura ke XV 1947-1949). Pada tahun 1949 Dalem Wiradipoetra mengajukan pensiun, Beliau Wafat dan dimakamkan di

Tanjungmalaya pada tanggal 22 Mei 1959. Berhentinya R. Tumenggung Wiradipoetr, maka jabatan Bupati selanjutnya dipegang oleh:

- 1) **Raden Tubagus Abas Wilagasomantri**, menjabat Bupati Tasikmalaya dari tahun 1948-1951
- 2) **Raden Priatnakusumah**, menjabat Bupati Tasikmalaya dari tahun 1951-1957
- 3) **Raden Ipung Gandapraja**, menjabat Bupati Tasikmalaya dari tahun 1957 - 1958
- 4) **Raden Memed Supartadireja**, menjabat Bupati Tasikmalaya dari tahun 1958 - 1966
- 5) **Kolonel Inf. Husen Wangsaatmaja**, menjabat Bupati Tasikmalaya dari Februari 1966 - 14 Februari 1974
- 6) **Drs. H. Kartiwa Suryasaputra**, menjabat Bupati Tasikmalaya dari tanggal 14 Februari 1974 – 5 Maret 1976
- 7) **Kolonel Inf. A Benyamin**, menjabat Bupati Tasikmalaya dari tanggal 5 Maret 1976 – 5 Maret 1981

Pada masa beliau tonggak sejarah kelahiran Kota Administrasi Tasikmalaya ditetapkan berdasarkan PP No. 22 Tahun 1976 oleh Mendagri H. Amir Machmud. Sekaligus dilantiknya Drs. H. Oman Roosman sebagai Walikota Administrasi Pertama oleh Gubernur KDH Tingkat 1 Jawa Barat H. Aang Kunaefi.

- 8) **Kolonel Inf. H. Hudly Bambang Aruman**, menjabat Bupati Tasikmalaya dari tanggal 5 Maret 1981 – 8 Maret 1986

- 9) **Kol. Inf. H. Adang Roosman, SH**, menjabat Bupati Tasikmalaya periode 1 tanggal 8 Maret 1986 – 8 Maret 1991, dan periode 2 tanggal 8 Maret 1991 – 8 Maret 1996, periode Tahun 1996 – 2001. Dimasa Beliau dirintisnya pembentukan Pemerintahan Kota Tasikmalaya.
- 10) **Drs. H. Tatang Farhanul Hakim, M.Pd.**, menjabat Bupati Tasikmalaya periode 1 Tahun 2001 – 2006, dan periode 2 Tahun 2006 – 2011, Dimasa beliau lah ibu kota pemerintahan kabupaten Tasikmalaya pindah ke Singaparna.
- 11) **H. UU. Ruzhanul Ulum, SE**, menjabat Bupati Tasikmalaya periode Tahun 2011 – 2019.
- 12) **H. Ade Sugianto**, menjabat PLT Bupati (menggantikan H. UU Ruzhanul Ulum yang menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat) Periode 2019 – Sekarang.

Demikian gambaran sejarah singkat kabupaten Tasikmalaya yang dikaitkan dengan penetapan hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 26 Juli 1632, sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya.

3.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya

Visi

“Kabupaten Tasikmalaya yang religius islami, mandiri, unggul dibidang agribisnis dan berbasis perdesaan.”

Misi

- 1) Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berahkaqlkarimah, berkualitas dan mandiri

- 2) Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis perdesaan dengan keunggulan agribisnis
- 3) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
- 4) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan

3.1.3 Letak Geografis

Kabupaten Tasikmalaya secara geografis terletak diantara 7°02'29'' dan 7°49'08'' lintang selatan serta 107°54'10'' dan 108°25'42'' bujur timur, dengan batas-batas wilayah:

- Sebelah utara: Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya dan Majalengka
- Sebelah timur: Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran
- Sebelah selatan: Samudra Hindia
- Sebelah barat: Kabupaten Garut

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0-2500 meter diatas permukaan laut (dpl). Secara umum wilayah tersebut dapat dibedakan menurut ketinggiannya, yaitu: bagian utara merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 1000-2500 meter dpl dan bagian selatan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0-100 meter dpl. Luas lahan tanah tahun 2014 (hektar) di Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh lahan pertanian sebesar 89,49 persen sedangkan sisanya yaitu 10,51 persen merupakan lahan bukan pertanian, hal tersebut menunjukan bahwa potensi pertanian merupakan sektor yang potensial di Kabupaten Tasikmalaya.

3.1.4 Gambaran Umum Dinas Kabupaten Tasikmalaya

Adapun dinas yang berada di Kabupaten Tasikmalaya menurut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

Tugas pokok

Melaksanakan kewenangan pemerintah daerah mengenai urusan pendidikan, pemuda dan olahragaberdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan Kebijakan teknis program pendidikan,
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum menangani pendidikan dan urusan pemuda dan olahraga,
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas mengenai urusan pendidikan dan urusan pemuda dan olahraga,
- d) Penyelenggaraan urusan tata usaha dinas,
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati

2) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tugas Pokok

Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah mengenai urusan administrasi keuangan dan asset daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis mengenai urusan administrasi keuangan Negara,
- b) Penyelenggaraan kegiatan penetapan anggaran daerah,
- c) Penyelenggaraan penetapan kebijakan pendapatan dan investasi daerah meliputi pajak dan retribusi daerah, investasi dan asset daerah serta pinjaman daerah,
- d) Pembinaan dan pelaksanaan tugas mengenai urusan administrasi keuangan daerah,
- e) Penyelenggaraan tata usaha dinas,
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati

3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Tugas Pokok

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pertanian tanaman pangan dan holtikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian tanaman pangan,
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura,
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura,
- d) Penyelenggaraan tata usaha dinas,
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati

4) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

Tugas Pokok

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan peternakan, perikanan dan kelautan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan, perikanan dan kelautan,
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan, perikanan dan kelautan,
- c) Penbinaan dan pelaksanaan tugas mengenai urusan peternakan, perikanan dan kelautan,
- d) Penyelenggaraan tata usaha dinas,
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati

5) Dinas Pertambangan dan Energi

Tugas Pokok

Dinas Pertambangan dan Energi melaksanakan kewenangan pemerintah daerah mengenai urusan pertambangan, energi dan sumber daya mineral berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis mengenai urusan pertambangan, energi dan sumber daya mineral,

- b) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan pelayanan umum mengenai urusan pertambangan, energi dan sumber daya mineral,
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas mengenai urusan pertambangan, energi dan sumber daya mineral,
- d) Penyelenggaraan tata usaha dinas,
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati

6) Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Tugas Pokok

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemerintah kewenangan pemerintah daerah mengenai urusan kehutanan dan perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis mengenai urusan kehutanan dan perkebunan,
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum mengenai urusan kehutanan dan perkebunan,
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas mengenai urusan kehutanan dan perkebunan,
- d) Penyelenggaraan tata usaha dinas,
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati

7) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Tugas Pokok

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah mengenai urusan koperasi, perindustrian dan perdagangan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi, bidang perindustrian dan bidang perdagangan,
- b) Penyelenggaraan dan pembinaan teknis kelembagaan, pengembangan sumber daya, bimbingan usaha dan pemasaran,
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi, bidang perindustrian dan bidang perdagangan,
- d) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian teknis kelembagaan, pengembangan sumber daya, bimbingan usaha dan pemasaran,
- e) Penyelenggaraan urusan tata usaha dinas,
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati

8) Dinas Kesehatan

Tugas Pokok

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah mengenai urusan kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan,
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang kesehatan,

- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan,
- d) Penyelenggaraan tata usaha dinas,
- e) Pelaksanaan tugas lainyang diberikan

9) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman

Tugas Pokok

Dinas Tata Ruang dan Pemukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah mengenai urusan penataan ruang dan urusan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Tata Ruang dan Pemukiman mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang tata ruang pemukiman,
- b) Penyelenggaraan dan pembinaan teknis dibidang penataan ruang, pemukiman dan bangunan,
- c) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang penataan ruang, pemukiman dan bangunan,
- d) Penyelenggaraan urusan tata usaha dinas,
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati

10) Dinas Perhubungan

Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahdaerah mengenai urusan perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis, dibidang perhubungan,

- b) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perhubungan,
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan,
- d) Penyelenggaraan urusan tata usaha dinas,
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati

11) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tugas Pokok

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah mengenai urusan social ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang social, tenaga kerja dan transmigrasi,
- b) Penyelenggaraan dan pembinaan teknis dibidang tata ruang, pemukiman dan ketransmigrasian,
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang social, tenaga kerja dan transmigrasi,
- d) Penyelenggaraan urusan tata usaha dinas,
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati

12) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah mengenai urusan kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil,
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil,
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil,
- d) Penyelenggaraan urusan tata usaha dinas,
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati

13) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tugas Pokok

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah mengenai urusan kepariwisataan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata dan kebudayaan,
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum mengenai urusan pariwisata dan kebudayaan,
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas mengenai urusan pariwisata dan kebudayaan,

- d) Penyelenggaraan urusan tata usaha dinas,
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati

14) Dinas Bina Marga dan Pengairan

Tugas Pokok

Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah mengenai urusan pekerjaan umum meliputi penyelenggaraan bina marga dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air,
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air,
- c) Penyelenggraan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air,
- d) Penyelenggaraan urusan tata usaha dinas,
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:2) Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan survey. Metode deskriptif analisis adalah suatu

metode yang meneliti status, kelompok manusia, objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan, gambaran atau lukisan sistematis, factual dan akurat mengenai objek yang diteliti (Nazir,2005:54).

Analisis deskriptif yaitu memberikan gambaran atau deskriptif empiris atas data yang di kumpulkan dalam penelitian (Ferdinand, 2013:72). Data tersebut berasal dari jawaban-jawaban responden atas item-item yang terdapat dalam kuesioner dan akan diolah dengan cara dikelompokkan dan ditabulasikan kemudian diberi penjelasan.

3.2.1 Operasional Variabel

Operasional Variabel ini digunakan untuk menentukan jenis dan indikator-indikator dari variable-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Selain itu proses ini juga dimaksudkan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat digunakan secara benar.

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Pengawasan Melekat dan Komitmen Organisasi Terhadap Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja”, maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Yaitu merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya *variabel dependen* (terikat). (Sugiyono,2015:38).

Dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti maka yang menjadi variabel bebas adalah:

a) Pengaruh Pengawasan Melekat (X_1)

Dengan indikator:

- Meningkatkan disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas
- Berkurangnya penyalahgunaan wewenang
- Berkurangnya tingkat kebocoran, pemborosan dan pungutan liar
- Cepatnya penyelesaian perizinan dan peningkatan pelayanan masyarakat

b) Komitmen Organisasi (X_2)

Dengan indikator:

- Komitmen afektif (*Affective commitment*)
- Komitmen berkelanjutan (*Continuance commitment*)
- Komitmen normatif (*Normative commitment*)

2. Variabel *Dependen*

Yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sigoyono, 2015:38). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, dengan indikator:

- Visi dan Misi yang hendak Dicapai
- Tujuan
- Sasaran
- Program
- Kegiatan

Untuk lebih jelasnya mengenai variabel penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 3.1:

Tabel 3.1
Operasional Variabel

[illegible]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Komitmen Organisasi (X2)	Komitmen organisasi adalah kekuatan yang bersifat efektif dan individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya kedalam organisasi (Porter yang dikutip Mowday dan dikutip kembali oleh Sri Kuntjoro (2009))	1. Komitmen afektif (<i>Affective commitment</i>) 2. Komitmen berkelanjutan (<i>Continuance commitment</i>) 3. Komitmen normatif (<i>Normative commitment</i>) (Mayer dan Allen yang dikutip oleh Fred Luthan, 2006:249)	• Keterikatan emosional karyawan • Keterlibatan dalam organisasi • Kerugian bila meninggalkan organisasi • Karyawan membutuhkan organisasi • Kesetiaan yang harus diberikan • Kewajiban yang harus diberikan	Interval	10 – 11 12 – 13 14 – 15
3	Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (Y)	Sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategi organisasi (Bastian, 2006)	1. Visi dan Misi yang hendak dicapai 2. Tujuan 3. Sasaran	• Capaian Jangka Panjang • Kerangka yang menggambarkan pencapaian visi • Rencana pembangunan Jangka Menengah • Pencapaian visi dan misi • Menggunakan kriteria yang spesifik, terukur dan dapat dicapai • Relevan dan ada batasan waktu	Interval	16 – 17 18 – 19 20 – 21

4. Program	• Target sasaran output dan outcome • Memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran	Interval	22 – 23
5. Kegiatan (Mardiasmo, 2009: 55)	• Menghasilkan output dan hasil yang penting • Pencapaian program		24 – 25

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis data:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2015:225) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara kuesioner kepada Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2015:225) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal lewat orang lain atau lewat dokumen.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku referensi, searching di internet, jurnal dan hasil penelitian sebelumnya.

3.2.2.2 Populasi Sasaran

Menurut Sugiyono (2015:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek/objek itu.

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi sasaran yang penulis teliti adalah subjek yang berhubungan dengan pengaruh pengawasan melekat dan komitmen organisasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yaitu organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah sebanyak 27 OPD yang terdiri atas 3 organisasi berbentuk Sekretariat, 14 organisasi berbentuk Dinas, 5 organisasi berbentuk kantor, 4 organisasi berbentuk Badan, dan 1 organisasi berbentuk Kecamatan sebagaimana disajikan dalam tabel 3.2

Tabel 3.2

Populasi Penelitian

No	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya
1	Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya
2	Sekretariat Daerah
3	Sekretariat DPRD
4	Dinas Pendidikan
5	Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
7	Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan
8	Dinas Pertambangan dan Energi
9	Dinas Kehutanan dan Perkebunan

10	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
11	Dinas Kesehatan
12	Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
13	Dinas Bina Marga dan Pengairan
14	Dinas Perhubungan
15	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
18	Kantor Satpol PP
19	Kantor Kesbang dan Linmas
20	Kantor Penelitian dan Pengembangan
21	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
22	Kantor Arsip dan Perpustakaan
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah
25	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27	Kecamatan

Sumber: website resmi Kabupaten Tasikmalaya

3.2.2.3 Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015:81). Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pengambilan sampel *nonprobability* sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Penentuan sample pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015:85). Teknik *purposive sampling* digunakan karena responden yang dipilih berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Adapun sample dalam penelitian ini yaitu seluruh Dinas yang berada di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dengan jumlah 28 responden yang diwakili

oleh Kepala Dinas dan masing-masing. Untuk lebih jelas berikut daftar sampel responden pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 3.3
Sampel Penelitian

No	Nama Instansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
4	Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan
5	Dinas Pertambangan dan Energi
6	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
7	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
8	Dinas Kesehatan
9	Dinas Tata Ruang dan Pemukiman
10	Dinas Bina Marga dan Pengairan
11	Dinas Perhubungan
12	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
jumlah	

Sumber: website resmi Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan Tabel 3.3 maka dapat dilihat bahwa jumlah responden untuk penelitian ini sebanyak 14 responden, dengan kriteria:

1. Pertanyaan mengenai Pengawasan Melekat (X_1) diberikan kepada bawahan Kepala Dinas yaitu, Pegawai Dinas.
2. Pertanyaan mengendai Komitmen Organisasi (X_2) dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (Y) diberikan kepada Kepala Dinas.

3.2.2.4 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data maupun informasi yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*field Research*), teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer, yaitu dilakukan melalui:

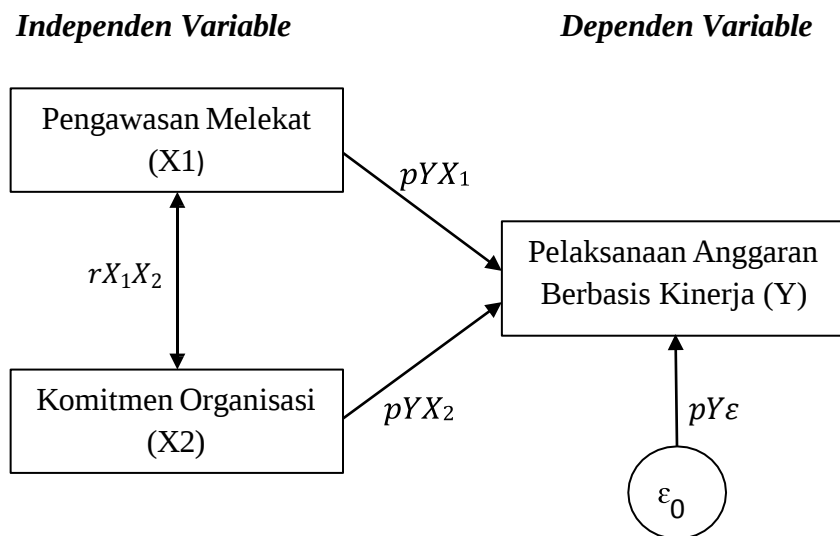
a) Kuesioner, adalah daftar isian terstruktur yang diajukan oleh penulis kepada responden yang berhubungan erat dengan topik permasalahan, kuesioner yang penulis ajukan kepada responden mengacu kepada indikator dari variabel independen maupun dependen. Penulis menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertutup (*closed question*). Kuesioner dengan pertanyaan tertutup meminta responden memilih salah satu atau mungkin beberapa jawaban dari satu set jawaban yang telah disediakan dan ditetapkan oleh peneliti (Sugiyama, 2008:159)

2. Studi Kepustakaan

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder guna mendukung data-data primer yang diperoleh dalam penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku serta referensi lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3.3 Model / Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini yakni Paradigma Ganda dengan Dua Variabel Independen dan satu Variabel Dependen yaitu “Pengaruh Pengawasan Melekat dan Komitmen Organisasi Terhadap Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja“, maka variabel penelitian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1
Model/Paradigma Penelitian

Dimana:

X_1 = pengawasan melekat

X_2 = komitmen organisasi

Y = pelaksanaan anggaran berbasis kinerja

ε = pengaruh faktor lain yang tidak diteliti

$r_{X_1X_2}$ = koefisien jalur Hubungan variabel X_1 terhadap X_2

p_{YX_1} = koefisien jalur Pengaruh variabel X_1 terhadap Y

p_{YX_2} = koefisien jalur Pengaruh variabel X_2 terhadap Y

3.4 Teknik Analisis Data

Data mentah yang diperoleh dari jawaban responden terhadap instrumen penelitian (kuesioner) yang disebar diolah menjadi data baku, instrumen penelitian yang di buat bertujuan untuk mentransformasi data kualitatif agar dapat dianalisis dengan metoode statistik yang diterapkan.

Format kuesioner untuk membuat pernyataan responden berbentuk multiple choice, dengan kelebihan mudah ditabulasi dan tepat untuk kuesioner yang diisi sendiri. Untuk analisis kuantitatif maka pemberian skor untuk setiap item kuesioner digunakan skala likert yang jumlahnya ganjil dengan nilai 1 sampai 5. Skala likert adalah skala yang dirancang untuk menguji apakah responden sangat tidak setuju (*strongly agree*) terhadap objek psikologi yang dinilainya (Sugiyama, 2008:98).

Pemberian skala pengukuran untuk setiap jawaban responden adalah menggunakan skala interval, yaitu skala yang menggunakan angka untuk suatu set objek maupun kejadian yang diukur (Sugiyama, 2008:81). Pemberian skala ini mengacu pada pernyataan Uma Sekaran (2006:197):” angka-angka dalam skala Likert dapat dirancang menunjukkan skala interval”.

Item-item yang disusun harus terdiri dari item positif dan negative. Adapun daftar pertanyaan dengan menetapkan skala likert pada alternative jawaban yang didapat akan dinilai dengan skor sebagai berikut:

Tabel 3.4
Skor untuk setiap pertanyaan

Pilihan jawaban	Jawaban untuk item positif	Jawaban untuk item negatif
Sangat setuju	5	1
Setuju	4	2
Tidak ada pendapat	3	3
Tidak setuju	2	4
Sangat tidak setuju	1	5

Sumber: Sugiyono, 2009:94

3.4.1 Uji Kualitas Data

3.4.1.1 Pengujian Validitas Alat Ukur

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan mengukur apa yang perlu diukur. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai tingkat kesalahan yang kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang memadai. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu: pengujian validitas konstruksi (*construct Validity*), pengujian validitas isi (*content Validity*), pengujian validitas eksternal (Sugiyono, 2015:125).

Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi dari masing-masing pernyataan dengan skor total. Rumus yang digunakan adalah produk moment (*product moment*) sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

- r = koefisien korelasi
- x = skor tiap item variabel x
- y = jumlah skor seluruh item variabel x
- n = jumlah responden

Jika dari hasil analisis tersebut diperoleh $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka data tersebut adalah signifikan (valid) berarti layak untuk digunakan dalam pengujian dalam pengujian hipotesis. Kemudian dapat ditentukan bahwa pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini valid, maka dilanjutkan dengan uji reabilitas.

3.4.1.2 Pengujian Reabilitas Alat Ukur

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data yang digunakan konsisten dalam mengungkapkan fenomena tertentudari sekelompok individu meskipun dilakukan dalam waktu yang berbeda (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo,2002).

Teknik yang digunakan untuk mengukur reabilitas adalah teknik Cronbach's Alpha. Pengujian reabilitas dengan teknik Cronbach's Alpha ini dilakukan untuk jenis data interval (Sugiyama,2008:199). Cronbach's Alpha dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan:

α = koefisien reabilitas alpha

k = banyak butir pertanyaan dan butir soal

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah variasi butir

σ_t^2 = variasi total

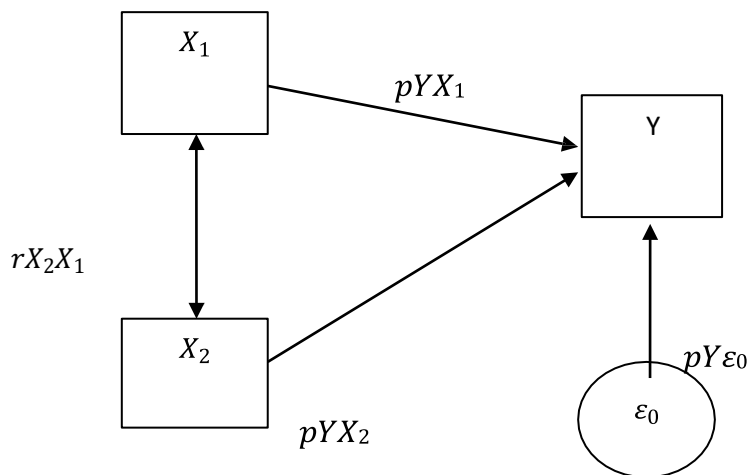
Koefisien reabilitas skala haruslah diusahakan setinggi mungkin yang besarnya mendekati satu. Adapun kaidah keputusan menggunakan nilai kritis Cronbach's Alpha yaitu jika nilai koefisien ≥ 0.70 maka instrumen tersebut dinyatakan *reliable* dan dapat digunakan untuk penelitian (Hair et.al:2010).

3.4.2 Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (*Path Analisis*).

Analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan memberikan estimasi tingkat kepentingan (*magnitude*) dan signifikansi (*significance*) hubungan sebab akibat hipotekal dalam seperangkat variabel. (Paul Webley 1997).

Berikut ini akan diterjemahkan sebuah diagram jalur:



Gambar 3.2
Struktur Path Analysis

Keterangan:

X_1 = pengawasan melekat

X_2 = komitmen organisasi

Y = pelaksanaan anggaran berbasis kinerja

ε = pengaruh faktor lain yang tidak diteliti

$r_{X_2X_1}$ = korelasi jalur Hubungan variabel X_1 terhadap X_2

p_{YX_1} = korelasi jalur Pengaruh variabel X_1 terhadap Y

p_{YX_2} = korelasi jalur Pengaruh variabel X_2 terhadap Y

1. Menghitung koefisien korelasi

Koefisien korelasi digunakan untuk menentukan tingkat keeratan hubungan antara X_1 dengan X_2 . Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$r_{X_i X_j} = \frac{n \sum_{h=1}^n X_{ih} X_{jh} - \sum_{h=1}^n X_{ih} \sum_{h=1}^n X_{jh}}{\sqrt{[n \sum_{h=1}^n X_{ih}^2 - (\sum_{h=1}^n X_{ih})^2][n \sum_{h=1}^n X_{jh}^2 - (\sum_{h=1}^n X_{jh})^2]}}$$

(sumber: Sitepu)

Koefisien korelasi ini akan besar jika tingkat hubungan antar variabel kuat. Demikian, jika hubungan antar variabel tidak kuat maka nilai r akan kecil, besarnya koefisien korelasi ini akan diinterpretasikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Tingkat Keeratan Hubungan

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,000 – 0,199	Sangat Rendah
0,200 – 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Cukup Kuat
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 – 1,000	Sangat Kuat

(Sugiyono, 2009:19)

1. Pengujian secara parsial (Individual)

Uji secara individual (parsial) ditunjukkan oleh Tabel *Coefficients* (pada SPSS). Hipotesis penelitian yang akan diuji dirumuskan berbentuk hipotesis statistik berikut:

$H_0 : \rho_{yx_i} = 0$

$H_a : \rho_{yx_i} > 0$

Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan secara parsial maka digunakan uji t, yang dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

$$t_{xi} = \frac{\rho_{xi}}{se \rho_{xi}}; (dk = n - k - 1)$$

$i = 1, 2, 3, \dots, k$

(Riduwan, 2012:123)

Keterangan:

Statistik $se \rho_{xi}$ diperoleh dari hasil komputasi pada SPSS untuk analisis regresi setelah data ordinal di transformasi ke interval.

Kaidah pengujian signifikansi (program SPSS):

- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas *Sig* (pada SPSS) atau $[0,05 \leq Sig]$, maka H_a ditolak dan H_o diterima artinya tidak signifikan.
- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas *Sig* (pada SPSS) atau $[0,05 > Sig]$, maka H_o ditolak dan H_a diterima artinya signifikan.

2. Menghitung koefisien jalur (*path*) secara simultan / keseluruhan.

Uji secara keseluruhan dirumuskan Hipotesis operasional sebagai berikut:

$$H_o : \rho_{yx_1} = \rho_{yx_2} = 0$$

$$H_a : \rho_{yx_1} = \rho_{yx_2} \neq 0$$

Uji signifikansi secara manual menggunakan persamaan:

$$F = \frac{(n-k-1)R^2_{YXk}}{k(1-R^2_{YXk})}$$

(Riduwan, 2012:117)

Keterangan:

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel *eksogen (independent)*

R^2_{yxk} = Rsquare

Kriteria pengujian:

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka tolak H_0 artinya signifikan, dan

$F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka terima H_0 artinya tidak signifikan.

Kaidah pengujian signifikansi (program SPSS):

- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas *Sig* (pada SPSS) atau $[0,05 \leq Sig]$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima artinya tidak signifikan.
- 3. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas *Sig* (pada SPSS) atau $[0,05 > Sig]$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya signifikan.
- 4. Pengujian faktor residu atau menghitung pengaruh variabel lain:

$$\rho_{YX_i} = \sqrt{(1 - R^2_{YX_1X_2 \dots X_k})}$$

$$\text{Dimana : } R^2_{YX_1X_2 \dots X_k} = \sum_{i=1}^k \rho_{YX_i} r_{YX_i}$$

- 5. Mencari pengaruh dari satu variabel ke variabel lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat disajikan melalui formula yang disajikan dalam

Tabel 3.6. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Formula Untuk Mencari Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung
Antara Variabel Penelitian

No	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total Pengaruh
1.	$Y \leftarrow X_1 \rightarrow Y =$ $(\rho_{YX_1})^2$ $= (A)$	$Y \leftarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow Y =$ $(\rho_{YX_1} \cdot r_{X_1X_2} \cdot \rho_{YX_2})$ $= (B)$	$X_1 \rightarrow Y$ $A + B = (C)$
2.	$Y \leftarrow X_2 \rightarrow Y =$ $(\rho_{YX_2})^2$ $= (D)$	$Y \leftarrow X_2 \rightarrow X_1 \rightarrow Y =$ $(\rho_{YX_2} \cdot r_{X_2X_1} \cdot \rho_{YX_1})$ $= (E)$	$X_2 \rightarrow Y$ $D + E = (F)$
3.	Total Pengaruh X_1 dan $X_2 \rightarrow Y$ secara simultan (C+F)		G
4.	Pengaruh residu 100% - G		H
5.	Total (G + H)		I

Dalam proses perhitungan *path analysis* di atas, penulis akan menggunakan bantuan SPSS Versi 21.00 dan *Microsoft Excel*.